

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak dilahirkan ke dunia memiliki kebebasan. Kebebasan tersebut mendapatkan pengakuan dari hak asasi manusia, oleh karena itu kebebasan anak dilindungi oleh negara dan hukum tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan oleh siapapun. Anak tetaplah anak yang melekat sifat ketidakmandirian, mereka membutuhkan kasih sayang dan perlindungan terhadap hak-haknya dari orang dewasa.¹ Anak adalah anugerah tidak ternilai yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada setiap pasangan manusia untuk dipelihara dilindungi, dididik. Ia adalah manusia yang mempunyai kemampuan fisik, mental, dan sosial yang masih terbatas untuk mengatasi berbagai resiko dan bahaya yang dihadapinya dan secara otomatis, masih bergantung pada pihak-pihak lain terutama anggota keluarga yang berperan aktif untuk melindungi dan memeliharanya. Perlindungan terhadap anak ini masih menjadi tanggung jawab berbagai pihak yaitu kedua orang tuanya, keluarganya, masyarakat, dan juga negara.²

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan undang-undang dasar negara republik Indonesia 1945 yang mengandung makna segala tindakan dan pola tingkah warga negaranya harus sesuai dengan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh

¹ Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada; Jakarta, hlm 13.

² Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama; Jakarta, hlm35.

negara. Tujuan negara republic Indonesia telah diatur dalam alinea ke IV Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa negara bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam usaha perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.³

Perlindungan anak menurut undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjamin bahwa negara indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan anak yang merupakan hak asasi manusia. Dan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana di amanatkan dalam undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.⁴

Undang-undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan pertama Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak mengamati Pemberian perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam Pasal 64 perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukuman sebagaimana di maksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf b “anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab masyarakat”. Kemudian pada perubahahan kedua undang-undang no 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak. Dimana mendapatkan perlindungan

³ Soerjono Soekanto, 2000, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers; Jakarta, Hlm 21.

⁴ Ibid., hlm 22.

terhadap keselamatan dan keamanan yang secara nyata memberikan hukuman kebiri kiniawi kepada pelaku pedofilia yang dirasa dapat memberikan general *deterrent effect* bagi pedofil dan masyarakat yang potensial terjerumusnya perilaku pedofilia.⁵

Kasus-kasus tindak pidana yang menjadi fenomena akhir-akhir ini adalah kekerasan seksual terhadap anak atau istilah ini bisa dinamakan kejahatan Pedofilia. Kejahatan pedofilia merupakan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa yang memiliki perilaku seksual menyimpang dengan menjadikan anak-anak sebagai sasaran pemuas nafsunya. Pelaku kejahatan pedofilia ini dinamakan dengan predator anak yang tak lain mereka adalah justru orang terdekat si anak. Para pelaku bisa dikatakan merata baik terjadi tengah-tengah masyarakat desa dan di kota, di ruang publik, lingkungan sekolah maupun lingkungan sosial anak lainnya. Kejahatan pedofilia harus di waspadai, karena secara fisik para pedofilia/ predator anak tidak ada bedanya dengan masyarakat lain yang biasanya berbaur, bergaul, tanpa ada yang tahu pelaku adalah seorang pelaku pedofilis. Kejahatan pedofilia sangat mengkhawatirkan karena memiliki jaringan terstruktur dengan beberapa pelaku pedofilia memanfaatkan kemajuan teknologi informasi .⁶

Mengenai cara bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pedofilia, bahwa mulai dari kebijakan formulasi hingga penegakan hukumnya harus memperhatikan cita hukum yang ideal dan aspek

⁵ Tini Rusmini, 2017, *Hukum perlindungan anak korban pedofilia*, Setara Press; Malang, hlm ix.

⁶ Ibid., hlm x.

viktimologis dari korban pedofilia. Penggunaan hukum pidana pada dasarnya memang harus di posisikan sebagai *ultimum remedium*. Namun untuk kejahatan pedofilia terhadap anak nampaknya perlu menjadikan hukum pidana sebagai *premium medium* dalam mempertanggung jawabkan pelaku kejahatan pedofilia.

Salah satu bentuk perkembangan tindak pidana yang telah terjadi beberapa minggu lalu yang melibatkan seorang tenaga kependidikan, ia merupakan seorang kepala sekolah di kawasan kabupaten malang, yang sejatinya kepala sekolah sendiri merupakan seorang *leader/* pemimpin yang bisa di jadikan contoh atau panutan bagi siswa dan guru yang lainnya di wilayah sekolah, namun perilaku ini sedikit tidak sepadan dengan jabatan yang di perolehnya karena telah melakukan sebuah kejahatan tindak pidana pencabulan kepada siswi muridnya. Sehingga mengakibatkan korban itu banyak yang trauma atau mengalami gangguan *psikis* sehingga siswi tersebut takut untuk pergi ke sekolah. Ini sangat mencoreng nama pendidikan di Indonesia karena sejatinya sekolah itu tempat untuk menuntut ilmu dimana orang tua memberikan amanat kepada guru untuk menjadikan anak belajar supaya lebih pandai dan mencerdaskan seorang anak.⁷

Menarik untuk di kaji karena perlindungan terhadap anak korban pedofilia dengan adanya hukuman kebiri kepada pelaku atau predator anak, akankah bisa membuat hukuman pidana sebagai *premium remedium* dalam mempertanggung jawabkan para pelaku kejahatan pedofilia ini akan berlaku

⁷ Ibid., hlm xii

sebagaimana di cantumkan dalam perubahan kedua undang-undang no 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak. penulis sedikit menyimpulkan dari beberapa contoh kasus di media cetak sebagai berikut.

Daftar tenaga pendidik yang terjerat kasus dugaan pencabulan bertambah panjang. Seorang oknum kepala sekolah menengah pertama Negeri (SMP) di laporkan ke Polres Malang atas dugaan tindakan asusila. Korbannya enam siswi di sekolah tersebut.⁸

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH TENAGA PENDIDIKAN”** (Studi di Polres malang)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis menemukan beberapa permasalahan sebagai berikut;

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan oleh tenaga kependidikan?
2. Bagaimana upaya penanganan yang dilakukan oleh Polres Malang terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan oleh tenaga kependidikan?

C. Tujuan Penulisan Hukum

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis kemukakan maka tujuan Penulisan Hukum ini adalah:

⁸ Tika Hapsar, 2018, *Kepala SMPN di Malang Diduga Cabuli 6 Siswi*, JawaPos. Di akses Tanggal 28 maret 2018.

1. Mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan oleh tenaga kependidikan?
2. Mengetahui upaya penanganan yang dilakukan oleh Polres Malang terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan oleh tenaga kependidikan?

D. Manfaat Penulisan Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik secara teoritis maupun secara praktis

1. Manfaat Teoritis; Menjadi kajian praktis mengenai bentuk perlindungan anak sebagai korban pencabulan
2. Manfaat Praktis; Untuk memberikan saran atau informasi mengenai perlindungan hukum yang tepat

E. Kegunaan Penulisan Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi berbagai pihak baik secara public atau private

1. Secara public: Polres dapat menjadikan masalah ini sebagai evaluasi untuk kedepannya agar tidak terjadi kejahatan terhadap anak
2. Secara private: Lebih mengerti bahwa suatu saat nanti kita juga akan menjadi tua dan pentingnya tentang perlindungan bagi anak

F. Metode Penelitian

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis / *sosial legal research* untuk mengkaji dan membahas bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum dan upaya penanganan.

Metode secara *yuridis* dengan memahami Undang-undang Sedangkan metode secara *sosisologis* dengan melihat secara langsung kenyataan dan kebenaran yang ada di lokasi penelitian untuk mengetahui bagaimana perlindungan yang di lakukan terhadap anak yang menjadi korban pencabulan.

1. Alasan Pemlihan Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan kurun waktu 2-5bulan dan tempat penelitian yaitu Polres Malang. Alasan memilih Polres Malang karena Polres Malang terkenal dengan banyak kasus yang melibatkan seorang anak

2. Data Penelitian

a. *Data Primer*

Data yang di peroleh saat penelitian berlangsung menggunakan wawancara dan melihat secara langsung kepada yang bersangkutan

b. *Data sekunder*

Data yang diperoleh dari dokumen - dokumen resmi, buku - buku, yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, dan termasuk data yang bersumber dari Polres Malang

3. Teknik Pengumpulan data

a. *Wawancara*

Dengan wawancara tersebut penulis dapat memperoleh data yang akurat dan benar mengenai objek yang diteliti

b. *Dokumentasi*

Dengan dokumentasi tersebut penulis dapat menyimpulkan hasil dari diskusi dengan dosen pembimbing.

G. Sistematika Penulisan Hukum

Gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum, maka peneliti menyiapkan suatu sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum terbagi dalam 4 (empat) bab yang saling berkaitan dan berhubungan. Sistematika dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Bab ini menguraikan bab pendahuluan, Pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode dan sistematika penulisan.;

BAB II: Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka yang terkait dengan judul yang penulis ajukan, Dalam bab ini berisikan mengenai tinjauan pustaka yang meliputi deskripsi dan uraian mengenai bahan teori, doktrin, pendapat ahli, kajian-kajian yuridis, yang mana nanti akan dijadikan landasan analisis hukum penulisan pada bab selanjutnya yakni pembahasan pada bab III.

BAB III: Bab ini merupakan yang memuat pembahasan Pada bab ini akan dipaparkan apa yang menjadi pokok permasalahan dan pemaparan hasil penelitian yang dilakukan penulis serta penggunaan bahan hukum sehingga dapat ditemukan jawaban dari permasalahan tersebut.

BAB IV: Penutup dalam bab ini merupakan bab akhir dalam penulisan hukum dimana berisi tentang kesimpulan, dan saran penulis terkait dengan permasalahan yang diangkat.